

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertandatangan di bawah :

Nama : Ii Imron Rosyadi
NIM : 172021028
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ISTRI YANG DICERAIKAN SUAMI ASN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 47/Pdt.G/2018/ PA.Pdlg)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku didunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, November 2020
Saya yang menyatakan

Materai 6000

Ii Imron Rosyadi
NIM : 172021028

PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis berjudul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TENTANG NAFKAH ISTRI
YANG DICERAIKAN SUAMI
ASN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Pandeglang
Nomor: 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg)

Nama : Ii Imron Rosyadi

NIM : 172021028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 22 Januari 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam.

Pandeglang, November 2020

Direktur



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.
NIP. 195908101990031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
NAFKAH ISTRI YANG DICERAIKAN
SUAMI ASN (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Pandeglang Nomor:
47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg)

Nama : Ii Imron Rosyadi

NIM : 172021028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Dede Permana, M.A.

Sekretaris : Dr. Dedi Sunardi, M.H.

Penguji I : Dr. In Ratna Sumirat, M.Hum.

Penguji II : Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H.

Pembimbing II : Dr. A. Zaini, M.Si.

Diuji di Serang pada tanggal 22 Januari 2021

Waktu : 14.00 WIB

Hasil/nilai : 3,59

Predikat : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Cumlaude~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul :

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ISTRI
YANG DICERAIKAN SUAMI ASN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg)

Yang ditulis oleh :

Nama : Ii Imron Rosyadi
NIM : 172021028
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis Magister dalam rangka memperoleh gelar M. H. (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 27 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H.

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP: 19650607 199203 1 005

ABSTRAK

Perceraian yang diajukan melalui lembaga perceraian atau pengadilan agama, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut, begitu pula terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang dihasilkan oleh mereka berdua selama perkawinan. Mengenai proses perceraian bagi suami istri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau salah satu yang berstatus PNS tidak semudah proses perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak berstatus PNS. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990. Namun ternyata dengan adanya peraturan tersebut tidak dapat menekan tingkat perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai gugat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fokus penelitian yang akan dikaji. Antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan/pemenuhan nafkah istri pasca perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh PNS?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh PNS.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analistis*.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa : 1. Pengadilan Agama Pandeglang tidaklah menerapkan dan menggunakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut terkait pembagian gaji bagi istri yang diceraikan karena peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hakim memiliki hak *contra legem* yaitu hakim diperbolehkan menabrak peraturan dan Undang-Undang yang berlawanan dengan adat suatu masyarakat. 2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan dasar hukum serta fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Putusan itupun telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Divorce filed through a divorce institution or a religious court, of course, will have legal consequences between the divorced husband and wife, as well as the children and marital assets generated by both of them during marriage. Regarding the divorce process for a husband and wife who is a Civil Servant (PNS) or one with a PNS status, it is not as easy as the divorce process carried out by a husband and wife who are not civil servants. This is because Civil Servants as elements of the state apparatus, state servants and public servants must be good role models for society in their behavior, actions and obedience to the prevailing laws and regulations, including in carrying out family life. Problems related to marriage and divorces for civil servants are regulated in PP. 10 of 1983 jo. PP No.45 of 1990. However, it turns out that the existence of this regulation cannot reduce the divorce rate, whether it is divorce, talak or divorce under the Religious Courts.

Based on the description above, there are several research focuses that will be studied. Among other things, as follows: 1. How is the implementation / fulfillment of wife's livelihoods after divorce according to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants jo. Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983? 2. What were the considerations of the Panel of Judges in determining the Decision on Case Number 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg concerning Divorce Cases filed by PNS?.

The objectives to be achieved in this study are as follows: 1. To find out how the implementation of Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants jo. Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983. 2. To find out what the Panel of Judges considered in determining the Decision on Case Number 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg concerning Divorce Cases filed by PNS.

The approach to the problem in this research is the normative juridical approach. The research specification used in this research is descriptive analysis.

This study found that: 1. The Pandeglang Religious Court did not apply and use Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 regarding the distribution of wages for divorced wives because the regulation is against Islamic law. Judges have the right to *contra legem*, that is, judges are allowed to violate regulations and laws that are against the customs of a community. 2. The panel of judges in deciding case Number 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg is based on considerations that are in accordance with the legal basis and facts found in the trial process. The decision was in accordance with and did not contradict the laws in force in Indonesia.

الملخص

سيكون للطلاق الذي يتم تقديمه من خلال مؤسسة طلاق أو محكمة دينية ، بالطبع ، عواقب قانونية بين الزوج والزوجة المطلقين ، وكذلك الأطفال والأصول الزوجية الناتجة عن كلاهما أثناء الزواج. فيما يتعلق بعملية الطلاق للزوج والزوجة اللذين يعملان في الخدمة المدنية (PNS) أو الشخص الذي لديه وضع PNS ، فإنه ليس بنفس سهولة عملية الطلاق التي يقوم بها الزوج والزوجة من غير موظفي الخدمة المدنية. وذلك لأن موظفي الخدمة المدنية كعناصر من جهاز الدولة وموظفي الدولة والموظفين العموميين يجب أن يكونوا قذرة جيدة للمجتمع في سلوكهم وأفعالهم وطاعتهم للقوانين والأنظمة السائدة ، بما في ذلك في ممارسة الحياة الأسرية. يتم تنظيم المشاكل المتعلقة بالزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية في PP رقم ١٠ لسنة ١٩٨٣ جو رقم PP ٤٥ لسنة ١٩٩٠. ومع ذلك ، فقد تبين أن وجود هذه اللائحة لا يمكن أن يقلل من نسبة الطلاق ، سواء كان الطلاق أو التلك أو الطلاق في ظل المحاكم الشرعية.

بناءً على الوصف أعلاه ، هناك العديد من محاور البحث التي سيتم دراستها. من بين أمور أخرى ، على النحو التالي: ١. كيف يتم تنفيذ / الوفاء ببعيشة الزوجة بعد الطلاق وفقاً لللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية. اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٠ بشأن تعديل اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣؟ ٢. ما هي اعتبارات لجنة القضاة في تحديد القرار بشأن القضية رقم ٤٧ / فدت / غ. / ٢٠١٨ / محكمة فنديغلا بشأن قضايا الطلاق المرفوعة من قبل PNS؟

الأهداف المراد تحقيقها في هذا البحث هي كما يلي: ١. معرفة كيفية تنفيذ القانون الحكومي رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية. اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٠ بشأن تعديل اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣. ٢. لمعرفة ما اعتبرته لجنة القضاة في تحديد القرار بشأن القضية رقم ٤٧ / فدت / غ. / ٢٠١٨ / محكمة فنديغلا بشأن قضايا الطلاق المرفوعة من قبل PNS.

إن منهج المشكلة في هذا البحث هو المنهج القانوني المعياري. يتم تنفيذ هذا النهج القانوني المعياري من خلال فحص اللوائح القانونية والنظريات القانونية والفقهاء المتعلقين بالمسائل التي تمت مناقشتها مواصفات البحث المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي. أجريت هذه الدراسة تحليلاً فقط على مستوى الوصف ، أي تحليل الحقائق وتقديمها بشكل منهجي بحيث يكون الاستنتاج أسهل وأكثر قابلية للفهم.

وجدت هذه الدراسة أن: ١. لم تطبق محكمة فنديغلا الدينية وتستخدم المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بشأن توزيع الأجر على الزوجات المطلقات لأن اللائحة تتعارض مع الشريعة الإسلامية. للقضاة الحق في مخالفة القانون ، أي أنه يُسمح للقضاة بانتهاك الأنظمة والقوانين التي تتعارض مع أعراف المجتمع. ٢. تستند هيئة القضاة في الفصل في القضية رقم ٤٧ / فدت / غ. / ٢٠١٨ / محكمة فنديغلا إلى اعتبارات تتفق مع الأساس القانوني والحقائق الموجودة في عملية المحاكمة. كان القرار متوافقاً مع القوانين المعمول بها في إندونيسيا ولا يتعارض معها.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana IAIN “SMH” Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1978, tanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut :

ā = Tekan a dan tekan shif+titik

Ā = Tekan A dan tekan shif+titik

ī = Tekan I dan tekan shif+titik

Ī = Tekan I dan tekan shif+koma

ū = Tekan u dan tekan shif+titik

Ū = Tekan U dan tekan shif+koma

ḥ = Tekan h dan tekan shif+kurung kurawal kanan

Ḥ = Tekan H dan tekan shif+kurung kurawal kiri

ṣ = Tekan s dan tekan shif+ kurung kurawal kanan

Ş = Tekan S dan tekan shif+kurung kurawal kiri

ṣ = Tekan s dan tekan garis miring

Š = Tekan S dan tekan shif+garis miring

ḍ = Tekan d dan tekan shif+kurung kurawal kanan

Ḍ = Tekan D dan tekan shif+ kurung kurawal kiri

ṭ = Tekan t dan tekan shif+kurung kurawal kanan

Ṭ = Tekan T dan tekan shif+kurung kurawal kiri

ẓ = Tekan z dan tekan garis miring

Ẓ = Tekan Z dan tekan shif+garis miring

ẓ̣ = Tekan z dan tekan shif+kurawal kiri

Ẓ̣ = Tekan Z dan tekan shif+kurung kurawal kiri

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B/b	Be
ت	ta'	T/t	Te

ث	tsa'	S/s	Tse (s titik di atas)
ج	jim	J/j	Je
ح	ha'	H/h	Ha (h titik di bawah)
خ	kha'	Kh/kh	Kha (gabungan k dan h)
د	dal	D/d	De
ذ	zal'	Z/z	Zal (z dengan titik di atas)
ر	ra'	R/r	Er
ز	zai	Z/z	Zet
س	sin	S/s	Es
ش	syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	sad	Ş/ş	Es (dengan titik atau garis di bawah)
ض	dad	D/ḍ	De (dengan titik atau garis dibawah)
ط	Ta'	T/ṭ	T (dengan titik atau garis di bawah)
ظ	ḡa	Z/ẓ	Z (dengan titik atau garis di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	Ge (gabungan ta dengan h)
ف	fa'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutoh

1. Bila diamalkan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dilakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al auliyā</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' *marbuthah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah* dan *dhammah* ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zak tul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas'a</i>
Kasrah+ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	Karim
Dammah+wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	Furūdu

Vokal Rangkap

Fathah+ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah+wawu mati	ditulis	ū
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

(QS. Al - Baqarah : 233)

PERSEMBAHAN

Puji Yang Maha Mulya, puji Yang Maha Tinggi penulis haturkan kehadirat Allah Illahirobbi, berkat taufiq dan rahmat-Nyalah pada hari ini penulis masih diberi kenikmatan yang tak terhingga dan karunia yang indah dibuktikan kepada penulis, juga kepada Ibunda Dra. Hj. Iyoh Sa'adiyah dan Ayahanda Drs. H. A. Hadi Rosyadi yang telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis dan memberikan motifasi moril maupun materil, saudara-saudaraku yang telah mendukung penulis, serta Istri tercinta Susilawati, S.E. yang selalu mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, tak lupa pula rekan-rekan penulis beserta sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang diharapkan, meskipun terdapat kesulitan dan rintangan dalam penyusunannya.

Sebagai sebuah karya manusia, tentu tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, apresiasi pembaca yang berupa saran dan kritik konstruktif sebagai tradisi ilmiah sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Telah banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang tidak dicantumkan namanya disini, secara khusus penulis ingin ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta segenap dosen dan asisten dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum. Direktur Program pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dosen beserta seluruh staff program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama kuliah di Program Hukum Keluarga Islam, serta memberikan dukungan yang tak ternilai kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. Pembimbing I dan Dr. Ahmad Zaini, M.Si. Pembimbing II yang telah menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan mengoreksi serta memberikan petunjuk dalam menyelesaikan tesis maupun selama dalam studi.
5. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang tanpa lelah memberikan semangat bagi penyelesaian tesis ini, Rekan-rekan, Karyawan-karyawati Pengadilan Agama Pandeglang yang telah member motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a semoga jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dicatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT.

Serang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kerangka Teori.....	19
E. Metode Penelitian.....	29
F. Manfaat Penelitian.....	37
G. Tinjauan Pustaka	38
H. Definisi Istilah	44
I.Sistematika Penulisan.....	47

BAB II HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DI INDONESIA

A. Nafkah Istri Pasca Perceraian Perspektif Imam Mazhab	49
B. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang ..	62

C. Teori Masalah Mursalah.....	79
D. Teori Istihsan.....	84
BAB III PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG DAN	
DESKRIPSI PUTUSAN 47/ PDT.G/ 2018/ PA.PDLG	
A. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama.....	89
B. Pengadilan Agama Pandeglang	114
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg	121
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 47/ PDT.G/ 2018/	
PA.PDLG DAN PELAKSANAAN NAFKAH ISTRI	
MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45	
TAHUN 1990	
A. Analisis Perceraian Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg	145
B. Penerapan Nafkah Istri Pasca Perceraian Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 di Pengadilan Agama Pandeglang.....	198
C. Analisis Penerapan Nafkah Istri Pasca Perceraian Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 di Pengadilan Agama Pandeglang ...	205
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	220
B. Saran.....	221
DAFTAR PUSTAKA	222
LAMPIRAN	230
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	239